



PEMERINTAH KOTA DENPASAR
INSPEKTORAT DAERAH

**LAPORAN
PELAKSANAAN
PENGARUSUTAMAAN
G E N D E R
SEMESTER I
TAHUN 2025**

Nomor : 700.1/2894/ITKO
Tanggal : 30 Juni 2025

"Vasudhaiva Kutumbakam"

KATA PENGANTAR



Pengarusutamaan Gender (PUG) merupakan strategi untuk mengintegrasikan perspektif gender ke dalam pembangunan, mulai dari penyusunan kebijakan, perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, serta pemantauan dan evaluasi.

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadapan Tuhan Yang Maha Esa/Ide Sang Hyang Widhi, yang telah melimpahkan rahmat-Nya, sehingga Laporan Pengarusutamaan Gender Semester I Tahun 2025 Inspektorat Daerah Kota Denpasar dapat diselesaikan sesuai waktu yang telah direncanakan.

Pengarusutamaan Gender (PUG) bertujuan untuk mewujudkan kesetaraan gender sehingga mampu menciptakan pembangunan yang lebih adil dan merata bagi seluruh penduduk. Kesetaraan gender dapat dicapai dengan mengurangi kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam mengakses dan mengontrol sumber daya, berpartisipasi diseluruh proses pembangunan dan pengambilan keputusan, serta memperoleh manfaat dari pembangunan guna mendukung pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Kota Denpasar.

Dengan tersusunnya Laporan Pengarusutamaan Gender Semester I Tahun 2025 ini, dapat menjadi bahan evaluasi dalam pelaksanaan program kegiatan berbasis gender kedepannya pada Inspektorat Daerah Kota Denpasar, dan kami berharap penyusunan Laporan Pengarusutamaan Gender Semester I Tahun 2025 ini dapat berguna bagi peningkatan kinerja kedepannya sesuai tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah Kota Denpasar.

Denpasar, 30 Juni 2025

Inspektur Daerah Kota Denpasar


Ir. Putu Naring Djayaningsih, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19650726 199201 2 001

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional, telah mengamanatkan kepada seluruh Menteri/Kepala Lembaga non Kementerian, Gubernur dan Bupati/Walikota seluruh Indonesia untuk melaksanakan Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam pembangunan. Pelaksanaan PUG tersebut diperkuat dengan dituangkan PUG sebagai salah satu isu lintas bidang selain pembangunan berkelanjutan dan pemerintahan yang baik (*good governance*) dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024.

Selain itu Kementerian Dalam Negeri telah mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 11 tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah. Salah satu substansi Permendagri tersebut adalah mendorong tersusunnya kelembagaan PUG di daerah, perencanaan responsive gender dalam dokumen RPJPD, RPJMD, RKPD, Renstra SKPD dan Renja SKPD serta tersusunnya Anggaran Responsif Gender (ARG) dalam RKA-SKPD.

Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Inspektorat Kota Denpasar telah mendorong Kesetaraan dan Keadilan Gender (KKG) melalui kebijakan dan program yang memperhatikan aspirasi, kebutuhan dan permasalahan perempuan dan laki-laki ke dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas seluruh kebijakan dan program khususnya dalam bidang pengawasan. Strategi inilah yang diperlukan untuk memastikan semua lapisan masyarakat dapat mengakses, berpartisipasi, ikut dalam pengambilan keputusan dan mendapatkan manfaat dari hasil pembangunan sesuai kebutuhan dan aspirasinya. Kesetaraan Gender adalah prinsip hak asasi manusia, prasyarat untuk pembangunan berkelanjutan yang berpusat pada masyarakat dan merupakan tujuan itu sendiri. Implementasi Pengarusutamaan Gender Inspektorat Kota Denpasar diterapkan dalam proses penyusunan kebijakan perencanaan dan penganggaran untuk

menjamin perencanaan dan penganggaran yang dibuat sudah responsif gender.

Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG) merupakan perencanaan yang disusun dengan mempertimbangkan empat aspek yaitu : akses, partisipasi, control dan manfaat yang dilakukan secara setara antara perempuan dan laki-laki, baik dan proses penyusunannya maupun dalam pelaksanaan kegiatannya. PUG sebagai strategi untuk mewujudkan Kesetaraan Gender (KG), bukan suatu tujuan. Untuk itu, perlu dilakukan analisis gender. Perencanaan Resposif Gender dilakukan untuk menjamin keadilan dan kesetaraan bagi laki-laki dan perempuan dalam akses, partisipasi, kontrol dan manfaat pembangunan. Penyusunan PPRG diawali dengan pengintegrasian isu gender dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran yang merupakan satu kesatuan tak terpisahkan. Analisa gender dilakukan dengan mengkaji isu/kesenjangan gender dalam output kegiatan. Analisis gender harus dilakukan sebelum merumuskan perencanaan dan program pembangunan. Dalam melakukan tahap analisis gender menggunakan alat analisis *Gender Analysis Pathway* (GAP).

Dengan telah teridentifikasinya isu/kesenjangan gender pada level output kegiatan melalui analisis gender, maka informasi yang ada kemudian dimasukkan ke dalam dokumen *Gender Budget Statement* (GBS). Analisis Gender sangat bermanfaat apabila dilaksanakan secara rutin, pada seluruh aspek program dan kegiatan pembangunan. Dengan dilakukannya Analisis Gender, berarti permasalahan gender di suatu daerah bentuk program dan kegiatan yang efektif.

B. DASAR HUKUM

1. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah.
3. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengarusutamaan Gender.

4. Surat Keputusan Walikota Denpasar Nomor 1018 Tahun 2020 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender.
5. Surat Keputusan Inspektur Daerah Kota Denpasar Nomor 100.32/46/ITKO/2025 Tahun 2025 tentang Penetapan *Focal Point* Pengarusutamaan Gender (PUG) Inspektorat Daerah Kota Denpasar

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Laporan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) bertujuan untuk memantau dan mengevaluasi Pengalokasian Anggaran Responsif Gender pada Inspektorat Daerah Kota Denpasar. PUG diarahkan untuk memastikan bahwa perempuan dan laki-laki mempunyai kesamaan akses untuk berpartisipasi, mengawasi dan memperoleh keuntungan yang sama dalam pembangunan. Dengan implementasi PUG, permasalahan gender dapat diidentifikasi melalui *gap* (celah) gender sehingga tujuan akhir dari pengarusutamaan gender adalah mempersempit dan bahkan meminimalisir celah gender.

D. RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Laporan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) ini adalah pada Inspektorat Daerah Kota Denpasar periode Semester I Tahun 2025.

BAB II

PELAKSANAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER

A. KOMITMEN

Komitmen dalam mendukung Implementasi Pengarusutamaan Gender (PUG) di lingkungan Inspektorat Daerah Kota Denpasar ditandai dengan dibentuknya Keputusan Inspektur Daerah Kota Denpasar Nomor 100.3.2/46/ITKO/2025 Tahun 2025 tentang Penetapan Focal Point Pengarusutamaan Gender. Komitmen Inspektorat Daerah Kota Denpasar dalam mendukung implementasi PUG ditandai dengan penyusunan dokumen perencanaan berbasis responsif gender dan melibatkan seluruh pegawai dalam pelaksanaan penugasan serta merasakan manfaat pembangunan dengan adil.

B. KEBIJAKAN

Kebijakan yang responsif gender pada Inspektorat Daerah Kota Denpasar salah satunya dituangkan dalam bentuk Keputusan Inspektur Daerah Kota Denpasar Nomor 700/115/ITKO/2021 tentang Pedoman Pengawasan atas Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender bahwa dalam rangka mendorong, mengefektifkan dan mengoptimalkan upaya pengarusutamaan gender secara terpadu dan terkoordinasi, perlu dilakukan pengawasan atas pelaksanaan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender.

C. KELEMBAGAAN

Dalam rangka penguatan pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) di lingkungan Inspektorat Daerah Kota Denpasar, telah dibentuk Keputusan Inspektur Daerah Kota Denpasar Nomor 100.3.2/46/ITKO/2025 Tahun 2025 tentang Penetapan *Focal Point* Pengarusutamaan Gender dan Keputusan Inspektur Kota Denpasar Nomor 700/116/ITKO/2021 tentang Pembentukan dan Susunan Keanggotaan Tim Evaluasi Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG) di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar, bahwa sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional dan dalam rangka terselenggaranya perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan

evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan yang berspektif gender, maka dipandang perlu membentuk tim evaluasi PPRG.

D. SUMBER DAYA MANUSIA DAN ANGGARAN

Dalam mendukung pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) di lingkungan Inspektorat Daerah Kota Denpasar, Pejabat dan APIP telah memiliki sertifikat Penyusunan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG), sementara staf lainnya telah memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang PUG karena sudah mengikuti pelatihan.

Selain dari sisi SDM, Inspektorat Daerah Kota Denpasar juga memperkuat pelaksanaan PUG dari sisi anggaran. Kegiatan Pengarusutamaan Gender (PUG) Inspektorat Daerah Kota Denpasar pada Semester I Tahun 2025 telah terlaksana dengan output kegiatan :

- 1) Inspektorat Daerah Kota Denpasar pada Semester I Tahun 2025 memiliki anggaran responsif gender sebesar Rp. 8.124.860.000,- (Delapan Miliar Seratus Dua Puluh Empat Juta Delapan Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah) dengan realisasi pelaksanaan anggaran responsif gender sebesar Rp. 1.781.367.762,- (Satu Miliar Tujuh Ratus Delapan Puluh Satu Juta Tiga Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh Dua Rupiah).
- 2) Inspektorat Daerah Kota Denpasar Tahun 2025 memiliki 3 Program, 10 Kegiatan dan 31 Sub Kegiatan. Dari 31 sub kegiatan yang ada, 18 sub kegiatan telah melalui *Gender Analysis Pathway* (GAP) yang sudah dinyatakan dalam *Gender Budget Statement* (GBS) dimana sub kegiatan yang dipilih untuk dianalisis merupakan :
 - mendukung pencapaian prioritas pembangunan nasional dan target-target SPM dan MDGs;
 - merupakan prioritas pembangunan daerah;
 - penting terkait isu gender
- 3) Sampai dengan Semester I Tahun 2025 pelaksanaan program dan kegiatan pada Inspektorat Daerah Kota Denpasar telah :
 - memberikan ruang dan kesempatan yang adil bagi perempuan dan laki-laki;

- kebijakan atau kegiatan pembangunan sudah melibatkan secara adil bagi perempuan dan laki-laki dalam menyuarakan kebutuhan, kendala termasuk dalam pengambilan keputusan;
 - kebijakan atau kegiatan sudah memberikan kesempatan yang sama kepada perempuan dan laki-laki untuk mengontrol sumber daya pembangunan;
 - kebijakan atau kegiatan sudah memberikan manfaat yang adil bagi perempuan dan laki-laki
- 4) Pelaksanaan kegiatan didukung dengan :
- Surat Perintah Tugas (SPT) pengawasan yang melibatkan baik perempuan dan laki-laki;
 - rencana diklat yang melibatkan secara adil bagi perempuan dan laki-laki;
 - daftar hadir rapat/kunjungan tamu yang melibatkan secara adil baik laki-laki maupun perempuan
- 5) Instansi yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan :
- Inspektorat Daerah Kota Denpasar sebagai salah satu driver Pokja PUG di Kota Denpasar sesuai SK Nomor 188.45/1018/HK/2020 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender berkolaborasi dengan Bappeda, DPPPAPPKB, DPMD dan BPKAD untuk selalu berupaya dalam percepatan pelaksanaan pelembagaan PUG di Kota Denpasar.
- 6) Sasaran kegiatan
- Dalam memaksimalkan kinerja pelayanan, Inspektorat Daerah Kota Denpasar berkomitmen untuk mengimplementasikan pengarusutamaan gender dalam mengurangi kesenjangan tingkat penerima manfaat pembangunan. Inspektorat Daerah Kota Denpasar memastikan aksesibilitas dan kesetaraan bagi individu disabilitas dengan menyediakan ruang parkir khusus dan jalan landai atau bidang miring (*ramp*) yang menghubungkan perbedaan ketinggian lantai yang membantu pengguna jalan untuk berpindah ke area yang lebih tinggi terutama bagi pengguna kursi roda. Selain itu Inspektorat Daerah Kota Denpasar memberikan fasilitas khusus bagi ibu menyusui yang dilengkapi dengan prasarana untuk menyusui, pemerah ASI dan menyimpan ASI perah pada ruang laktasi.



Gambar 2. 1 Ruang Laktasi

Sasaran pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) di Inspektorat Daerah Kota Denpasar adalah seluruh pegawai serta tamu yang berkunjung ke Inspektorat Daerah Kota Denpasar. Beberapa sasaran implementasi PUG lainnya yaitu :

- a) Menjamin kesetaraan kesempatan dan penghargaan bagi perempuan dan laki-laki
- b) Memastikan partisipasi penuh perempuan dan laki-laki dalam pengambilan keputusan
- c) Memastikan seluruh masyarakat baik pegawai maupun tamu yang berkunjung mendapatkan manfaat yang sama dalam merasakan dampak pembangunan.



Gambar 2. 2 Parkir Khusus Disabilitas



Gambar 2. 3 Jalan landai (*ramp*)

Dalam pelaksanaan PPRG Inspektorat Daerah Kota Denpasar telah menyusun *Gender Analysis Pathway (GAP)* dan *Gender Budget Statement (GBS)* serta KAK, berikut tabel ketersediaan KAK, GAP dan GBS pada Inspektorat Kota Denpasar Tahun 2024 :

Tabel. 2.1 Ketersediaan KAK, GAP dan GBS dalam Kegiatan TA 2025

KODE REK.	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	SUMBER DANA	ADA/TIDAK		
					KAK	GAP	GBS
1	2	3	4	5	6	7	8
	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN						
	INSPEKTORAT DAERAH						
6.01.6.01. 0.00.00 1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	35.056.099.908	14.047.038.366				
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	22.820.107.688	11.538.539.360				
6.01.6.01. 0.00.001. 2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	22.820.107.688	11.538.539.360	APBD	√		
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	3.280.834.000	721.966.348				
6.01.6.01. 0.00.001. 2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	3.280.834.000	721.966.348	APBD	√	√	√
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	849.723.980	185.861.614				
6.01.6.01. 0.00.001. 2.06.01.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	18.249.000	-	APBD	√		
6.01.6.01. 0.00.001. 2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	124.625.500	12.623.000	APBD	√		
6.01.6.01. 0.00.001. 2.06.03.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	98.604.230	-	APBD	√		
6.01.6.01. 0.00.001. 2.06.04.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	144.788.250	26.529.750	APBD	√		
6.01.6.01. 0.00.001. 2.06.05.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	120.651.000	15.628.800	APBD	√		
6.01.6.01. 0.00.00 1. 2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	14.400.000	4.860.000	APBD	√		
6.01.6.01. 0.00.001. 2.06.08.	Fasilitasi Kunjungan Tamu	158.600.000	90.000.000	APBD	√	√	√
6.01.6.01. 0.00.00 1. 2.06.09.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	169.806.000	36.220.064	APBD	√	√	√
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2.261.045.000	886.214.000				
6.01.6.01. 0.00.001. 2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2.261.045.000	886.214.000	APBD	√	√	√

KODE REK.	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	SUMBER DANA	ADA/TIDAK		
					KAK	GAP	GBS
1	2	3	4	5	6	7	8
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.830.809.240	572.743.794				
6.01.6.01.0.00.001.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	196.800.000	64.888.254	APBD	v		
6.01.6.01.0.00.001.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	112.560.000	19.500.000	APBD	v		
6.01.6.01.0.00.001.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.521.449.240	488.355.540	APBD	v		
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.013.580.000	141.713.250				
6.01.6.01.0.00.001.2.09.01.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	52.300.000	16.533.200	APBD	v		
6.01.6.01.0.00.001.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	438.780.000	113.097.700	APBD	v		
6.01.6.01.0.00.001.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	3.522.500.000	12.082.350	APBD	v		
6.01.6.01.0.00.00 2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	849.856.000	38.087.150				
	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	764.536.000	38.087.150				
6.01.6.01.0.00.002.2.01.01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	511.857.000	5.121.700	APBD	v	v	v
6.01.6.01.0.00.002.2.01.02.	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	81.237.000	-	APBD	v	v	v
6.01.6.01.0.00.002.2.01.03	Reviu Laporan Kinerja	9.823.500	2.296.626	APBD	v	v	v
6.01.6.01.0.00.002.2.01.04.	Reviu Laporan Keuangan	111.377.000	25.964.781	APBD	v	v	v
6.01.6.01.0.00.002.2.01.05	Pengawasan Desa	16.669.500	3.279.043	APBD	v	v	v
6.01.6.01.0.00.002.2.01.07	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	33.572.000	1.425.000	APBD	v	v	v
	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	85.320.000	-				
6.01.6.01.0.00.002.2.02.01	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/ Daerah	14.182.000	-	APBD	v	v	v

KODE REK.	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	SUMBER DANA	ADA/TIDAK		
					KAK	GAP	GBS
1	2	3	4	5	6	7	8
6.01.6.01. 0.00.002. 2.02.02	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	71.138.000	-	APBD	V	V	V
6.01.6.01. 0.00.003.	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	1.404.719.000	8.880.200				
	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitas Pengawasan	48.846.000	2.315.000				
6.01.6.01. 0.00.003. 2.01.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	9.224.000	2.315.000	APBD	V	V	V
6.01.6.01. 0.00.003. 2.01.02.	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitas Pengawasan	39.622.000	-	APBD	V	V	V
	Pendampingan dan Asistensi	1.355.873.000	6.565.200				
6.01.6.01. 0.00.003. 2.02.01	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintah Daerah	67.928.000	900.000	APBD	V	V	V
6.01.6.01. 0.00.003. 2.02.02	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi	51.907.000	5.665.200	APBD	V	V	V
6.01.6.01. 0.00.003. 2.02.03.	Koordinasi, Monitoring, dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	1.000.682.000	-	APBD	V	V	V
6.01.6.01. 0.00.003. 2.02.04	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	235.356.000	-	APBD	V	V	V
TOTAL ANGGARAN DAN REALISASI		37.310.674.908	14.094.005.716				
TOTAL ANGGARAN DAN REALISASI RESPONSIF GENDER SD SMT I		8.124.860.000	1.781.367.762				

E. DATA TERPILAH

Data terpilah adalah variabel-variabel yang terpilah menurut jenis, ciri atau karakteristik. Data terpilah menurut jenis kelamin dapat membuka wawasan tentang ada/tidaknya kesenjangan gender. Pemilahan data menurut jenis kelamin merupakan prasyarat utama dilakukannya analisis gender yang bermanfaat dalam penyusunan analisis kebijakan dan penyusunan anggaran yang responsif gender. Tersedianya data terpilah gender pada Inspektorat Daerah Kota Denpasar terimplementasi pada setiap daftar hadir rapat yang dilaksanakan.

F. ALAT ANALISIS

Alat analisis yang digunakan untuk membantu perencanaan dan pelaksanaan isu gender adalah *Gender Analysis Pathway* (GAP) dan *Gender Budget Statement* (GBS). GAP merupakan instrumen untuk menganalisis isu gender dalam perencanaan, program, dan kegiatan yang bertujuan untuk mereformulasi tujuan, menetapkan rencana, menetapkan baseline, dan merumuskan indikator-indikator yang dapat mengatasi kesenjangan gender dalam akses, partisipasi, kendali/kontrol, dan manfaat. Sedangkan GBS merupakan dokumen yang menginformasikan suatu output telah responsif terhadap isu gender yang ada, dan apakah telah dialokasikan dana yang memadai pada kegiatan bersangkutan untuk menangani permasalahan kesenjangan gender.

Tahun 2025 Inspektorat Daerah Kota Denpasar telah menyusun alat analisis isu gender untuk 18 sub kegiatan. GAP dan GBS yang telah disusun menunjukkan bahwa Inspektorat Daerah Kota Denpasar memiliki Anggaran Responsif Gender (ARG) dalam mendukung pembangunan di Kota Denpasar.

G. PARTISIPASI MASYARAKAT

Inspektorat Daerah Kota Denpasar telah melaksanakan kegiatan yang melibatkan lembaga masyarakat dan *stakeholders* untuk menyerap anggaran responsif gender seperti pendidikan dan pelatihan, sosialisasi antikorupsi dan saber pungli, pelatihan kantor sendiri, forum konsultasi publik dan pemeliharaan fasilitas kantor agar manfaatnya dapat dirasakan semua masyarakat.

BAB III

PERMASALAHAN DAN UPAYA

A. PERMASALAHAN

Pengarusutamaan Gender merupakan strategi untuk memastikan laki-laki dan perempuan memperoleh akses, partisipasi, kontrol dan manfaat yang adil dalam pembangunan. Meskipun PUG sudah digaungkan namun masih adanya implementasi yang belum sesuai rencana. Beberapa permasalahan yang dihadapi diantaranya :

- Belum terintegrasi secara menyeluruh dalam rencana kebijakan, program dan kegiatan pemangunan daerah
- Kurangnya partisipasi dalam mengadakan kegiatan yang mendukung terwujudnya pembangunan responsif gender
- kurang maksimalnya partisipasi dan disiplin dalam melakukan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG)

B. UPAYA

Berbagai upaya telah dilakukan untuk kelancaran pelaksanaan PUG diantaranya :

- Inspektorat Daerah Kota Denpasar telah mengintegrasikan isu gender dalam kebijakan dan perencanaan di masing-masing program dan kegiatan dan memfasilitasi penyusunan Rencana Kerja yang berspektif gender
- Inspektorat Daerah Kota Denpasar telah melaksanakan sosialisasi dan advokasi terkait PUG kepada seluruh pejabat dan staf di lingkungan Inspektorat Daerah Kota Denpasar
- Inspektorat Daerah Kota Denpasar telah membangun sarana dan prasarana responsif gender dengan menyediakan ruang laktasi, parkir prioritas, jalan landai ramah disabilitas.
- Inspektorat Daerah Kota Denpasar telah melibatkan laki-laki dan perempuan dalam setiap penugasan dengan adil.


BAB IV PENUTUP

Demikian Laporan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender pada Inspektorat Daerah Kota Denpasar yang disusun dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan, Program dan Kegiatan yang dilakukan sampai dengan Semester I Tahun 2025. Untuk hal itu masukan, saran, pendapat serta kritik yang membangun sangat diharapkan sebagai bahan kami untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan Laporan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender ini.

Demikian laporan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Semester I Tahun 2025 pada Inspektorat Daerah Kota Denpasar apabila ada kekeliruan akan diadakan revisi ataupun perbaikan sebagaimana mestinya.

Denpasar, 30 Juni 2025
Inspektur Daerah Kota Denpasar,




Ir. Putu Naning Djyaningsih, M.Si
Pembina Utama Muda / IVc
NIP. 19650726 199201 2 001

DOKUMENTASI KEGIATAN

Exit Meeting Pemeriksaan atas LKPD Tahun 2024



Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pergub 47/2019 dan SE No.9 Tahun 2025



Kaji Banding UPP Kota Malang ke UPP Kota Denpasar



Sosialisasi dan Rapat Koordinasi Pengawasan Tahun 2025



Forum Perangkat Daerah



Pengelolaan Pengaduan *Whistleblowing System* Dugaan Tindak Pidana Korupsi di Lingkungan Pemerintah Daerah



Bimbingan Teknis SAKIP



Bimbingan Teknis BOSP



Bimbingan Teknis SPIP dan MR



Pendidikan dan Pelatihan Interpersonal Skill



Sosialisasi Anti Gratifikasi dan Pencegahan Pungutan Liar di Sektor Pendidikan

